

PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENYONGSONG ABAD XXI Strategi Dalam Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya

Hj. Saryani *)

ABSTRAK

Dalam tulisan ini memadukan penelusuran empirik terhadap proses kebijakan untuk menghasilkan beberapa temuan yang relevan dengan sasaran kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata dapat mendorong terwujudnya keuletan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi tantangan dan hambatan. Strategi dan implikasi kebijakan pengembangan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan daerah, swasta, dan masyarakat.

Kedua, hasil analisis ini memberi gambaran bahwa strategi dan implikasi kebijakan pengembangan pariwisata dapat mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

A. PENDAHULUAN

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah pusat pengembangan dan pelayanan pariwisata utama terutama wisata budaya, memiliki obyek dan daya tarik wisata bernilai historis seperti : Keraton Yogyakarta, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Purawisata, Candi Ratu Boko, Pesanggrahan Taman Sari, Monumen Yogyakarta Kembali, Benteng Vredenburg, Museum Negeri Sonobudaya, Desa Kerajinan Kasongan, Kebon Binatang GembiraLoka, Seni Budaya Tradisional, Wisata Alam Hutan Kaliurang, serta Pantai Glagah Indah, Baron, Kukup, Krakal, Pantai Parangtritis mampu menarik

wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik dalam jumlah besar. Objek dan daya tarik wisata Propinsi DIY sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan segmen pasar wisata potensial di masa depan dan pengembangannya menuntut fleksibilitas penyesuaian produk dengan permintaan (minat) wisatawan internasional, sebab hanya sebuah daerah yang kreatif dan fleksibel bisa bersaing dan menjamin pariwisata yang berkelanjutan. Pengelolaan potensi pariwisata harus disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing, Weber (1997, 1 – 2).

*) Dosen Tetap STP AMPTA Yogyakarta

Berkaitan dengan pengelolaan potensi pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Weber (1997, 1 - 2) menegaskan :

"Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak semua segmen yang semakin menonjol di pasar permintaan juga dapat dipenuhi di semua daerah Batam, Bintan, dan Bali dengan panjang pantai dan daya tampung yang cukup tinggi misalnya tetap mampu menarik wisatawan secara massa. Sebaliknya D.I. Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan memiliki potensi pariwisata yang cukup bervariasi, tetapi kerapuhan produk, sebagian besar tidak dapat dijual secara massa."

Ungkapan Weber di atas menunjukkan kelemahan pengembangan dan pendayagunaan potensi pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada sisi lain, para penentu kebijakan pariwisata maupun pelaku wisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat sorotan atau kritikan dari peneliti dan pengamat masalah pariwisata bahkan dari wisatawan, karena dianggap "*terlalu berorientasi*" pada segi materiil (ekonomi) mengabaikan segi sosiologis, psikologis, serta keamanan. Faktor keamanan dan kenyamanan wisatawan banyak dikritik oleh wisatawan, seperti yang dikeluhkan wisatawan Jepang terhadap pelaku pariwisata di Yogyakarta terungkap dari hasil wawancara antara Salam (sek. Pusat Studi Jepang UGM) dengan wartawan Suara Pembaharuan menegaskan, "*agar Yogyakarta siap untuk menangani kunjungan wisatawan Jepang, pihak pengelola wisata harus dapat menangkap secepat mungkin keluhan-keluhan mereka, antara lain adanya rasa tidak aman, masalah kebersihan, dan*

sebagainya", Suara Pembaharuan (1997, 20 April).

Perbedaan persepsi antara Perguruan Tinggi, Departemen Kehutanan, Departemen PARPOSTEL, dan Pelaku Wisata mengenai pengelolaan dan pendayagunaan potensi pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kendala atau hambatan yang dihadapi saat ini (Seminar Pariwisata; 1997, 6 Mei). Kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi lintas sektoral di bidang pariwisata, dan menjadi faktor penghambat terciptanya suasana kondusif bagi peningkatan efektivitas dan aksesibilitas pengembangan pariwisata di masa depan.

Sorotan, kritikan, kelemahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan pendayagunaan potensi pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dideskripsikan di atas, merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi, sekaligus sebagai indikator yang menunjukkan bahwa upaya dan pendayagunaan potensi pariwisata yang dilaksanakan belum mampu mengangkat harkat dan derajat pariwisata nusantara di forum internasional.

Aspek lain yang belum mendapat perhatian serius dari penentu kebijakan maupun pelaku wisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah langkah antisipatif terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh meningkatnya arus wisatawan mancanegara. Interaksi dan interrelasi warga masyarakat penerima dengan wisatawan yang berbeda latar belakang budaya dan adat istiadat dapat memberi kontribusi negatif terhadap perubahan nilai sosial budaya seperti;

perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat penerima yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa, timbulnya kecemburuan sosial dan kebingungan warga masyarakat yang bersifat sosio-psykologis, bahkan di beberapa lokasi wisata timbul berbagai kriminalitas yang mengancam keamanan dan keselamatan wisatawan domestik maupun mancanegara. Perlu disadari bahwa kelemahan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh peningkatan arus wisatawan mancanegara tidak hanya merugikan prospek pariwisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi dalam tataran makro akan menimbulkan berbagai "perubahan dan pergeseran nilai sosial budaya yang tidak terkendali", seperti merosotnya nilai moralitas dan mentalitas warga masyarakat, pemujaan terhadap kebebasan dan individual, serta timbulnya kegoncangan-kebingungan warga masyarakat dalam memilih nilai dan norma yang baik dan tidak baik, yang oleh Soemardjan (1991, 169 – 189) dikatakan sebagai munculnya "*periode anomie*" yang diwarnai oleh kebingungan dalam kehidupan sosial budaya, dimana masyarakat mengalami situasi sosial-psikolog dimana orang sering tidak tahu nilai-nilai mana yang dianggap baik dan nilai-nilai mana yang dianggap tidak baik.

Menyadari berbagai fenomena perubahan dan pergeseran nilai sosial yang berhubungan langsung dengan meningkatkannya arus wisatawan mancanegara maupun domestik di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu merumuskan suatu strategi pengembangan dan pendayagunaan potensi pariwisata yang mencerminkan "upaya merekayasa" perubahan nilai sosial budaya sekaligus sebagai sarana untuk memelihara integritas kehidupan sosial budaya, seperti; semakin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatnya rasa kebangsaan dan bangsa

terhadap budaya bangsa sendiri, serta terpeliharanya stabilitas dan ketahanan nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bertitiktolak pada segala upaya yang dilakukan para penentu kebijakan dan pelaku wisata, dan segenap tantangan, kelemahan dan kendala yang dihadapi, maka perlu dirumuskan bagaimana strategi dan pengembangan pariwisata dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga diperoleh gambaran objektif dan ilmiah mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi pariwisata, maupun untuk menemukan model, solusi, dan strategi yang efektif untuk diterapkan pada masa depan sebab tugas ini bukan saja tugas dan tanggung jawab pemerintah khususnya Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, melainkan tugas dan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

C. STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA

Pembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang secara makro dapat mempengaruhi dan memberi kontribusi bagi kelancaran pembangunan diberbagai bidang. Pada sisi lain, interrelasi dan interaksi antara para wisatawan dengan masyarakat maupun dampak pembangunan pariwisata secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi eksistensi dan aktivitas

kehidupan sosial dalam masyarakat, yang menurut Wahab (1996, 65) bisa menjadi unsur keberuntungan atau malapetaka bagi negara penerima.

Menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan pengembangan pariwisata yang mampu mengakses semua unsur terkait; pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, prinsip pengembangan pariwisata DIY (Dinas Pariwisata DIY; 1987), menganut kepada ideal pengembangan kepariwisataan:

- a) Mendukung upaya peletarian budaya bangsa dan penumbuhan rasa cinta akan tanah air, bagi masyarakat setempat dan wisatawan.
- b) Meningkatkan pendapatan daerah.
- c) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
- d) Menampung kegiatan utama pariwisata domestik, disamping pariwisata asing.

Sedangkan penentu keberhasilan pengembangan pariwisata diletakkan pada hubungan segitiga kausal kegiatan kepariwisataan; pengembangan kepariwisataan disatu pihak hendaknya didorong ke arah motivasi yang positif bagi perkembangan sosial budaya masyarakat. Secara nyata diharapkan menaikkan kesempatan kerja dan tingkat pendapatan penduduk yang terlibat di dalamnya dan masyarakat sekitarnya. Selain itu diharapkan menarik dan merangsang kegiatan ekonomi wilayah yang menciptakan permintaan dan pemenuhan pelayanan bagi kehidupan kepariwisataan, (Dinas Pariwisata DIY; 1987).

Dengan prinsip pengembangan dan pola penentu keberhasilan pengembangan seperti ditegaskan di atas, pengembangan pariwisata

DIY dapat mengikuti perkembangan pariwisata nasional yang begitu cepat, yang memerlukan cara penanganan, pengelolaan dan strategi pengembangan yang benar dan efektif.

Pada aras tertentu, perkembangan pariwisata tidak mampu diikuti oleh daya dukung struktur dan infra struktur secara tingkat kesiapan pengelola wisata, pada aras lain menuntut jajaran pariwisata, swasta dan masyarakat untuk memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi segala tantangan dan dampak pembangunan pariwisata demi kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

Trend wisata internasional saat ini berorientasi pada wisata alternatif yang disebut minat khusus, dan kecenderungan ini merubah pola perilaku, motivasi dan tujuan wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata. Oleh sebab itu produk wisata (*tourist product*) dan paket wisata (*package tour*) pada umumnya disesuaikan dengan orientasi wisata minat khusus yang fenomena dan karakteristiknya memungkinkan untuk mengadakan interrelasi dan interaksi langsung dengan warga masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata.

Untuk menghadapi tantangan pembangunan pariwisata minat khusus di DIY serta mengantisipasi segala dampaknya, diperlukan dukungan dan keterlibatan prokatif unsur masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Kepedulian dan peran serta aktif masyarakat luas terhadap pengembangan pariwisata merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan. Namun kendala yang dihadapi adalah belum dipahaminya konsep partisipasi masyarakat dari pihak perencana dan pelaksana pembangunan, (Soetrisno, 1995; 207).

Melihat bentuk keterlibatan masyarakat secara positif dan normatif. Keterlibatan positif terjadi karena wisatawan menginginkan interaksi untuk mengetahui kebudayaan, gaya hidup, adat-istiadat masyarakat setempat. Keterlibatan normatif terjadi karena penyelenggaraan wisata minat khusus bersifat "*community based*" dan memberi dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat setempat.

Karena penyelenggaraan wisata minat khusus bersifat *community based* dan memberi dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, pemerintah DIY telah melakukan upaya pembinaan terhadap sentra-sentra industri kecil pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wisata guna mendukung kegiatan dan terciptanya iklim yang baik dalam pengembangan pariwisata. Kondisi seperti ini mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sekaligus menjalin interaksi positif antara pengembangan objek wisata dengan pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi wisata.

Pada sisi lain, Pemerintah DIY semakin menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, sehingga komponen sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan pengembangan pariwisata diperhatikan. Agar terciptanya arus timbal balik, pengembangan pariwisata di seluruh kawasan DIY diharapkan memberi pengaruh positif bagi kehidupan penduduk di sekitar lokasi wisata, dan secara ekonomis diharapkan terjadi interaksi positif antara pengembangan objek wisata dengan perkembangan kehidupan ekonomi penduduk di sekitarnya, (Dinas Pariwisata DIY; 1987).

Keterlibatan positif dan normatif masyarakat dalam pengembangan pariwisata, bila dikaji dengan pendekatan ketahanan nasional akan membentuk kualitas dan kekuatan pribadi, masyarakat dan bangsa yang tangguh, kokoh dan kuat dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan. Sehubungan dengan masalah ini perlu ditegaskan; "kualitas diri warga masyarakat akan membentuk kekuatan dan kekukuhan sebagai dipersepsikan oleh pihak lain".

Keuletan dan ketangguhan masyarakat akan melahirkan kekuatan tangkal menghadapi ancaman dan hambatan yang merongrong identitas dan integritas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya keuletan dan ketangguhan masyarakat dapat ditingkatkan apabila di dukung oleh peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Sehubungan dengan proposisi ini Suryohadiprojo (1997, 15 – 16) menegaskan; "kekuatan rakyat sebaliknya didukung oleh kehidupan rakyat yang cukup sejahtera dan maju dalam segi materinya. Rakyat yang cukup sejahtera, ia juga lebih sehat dan lebih mampu untuk mengembangkan aneka ragam kekuatan". Untuk itulah dalam menghadapi ancaman, hambatan maupun mengantisipasi dampak negatif dari interaksi dan interrelasi langsung antara wisatawan dengan masyarakat setempat perlu diimbangi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama yang tinggal di sekitar lokasi wisata.

Strategi dan implikasi kebijakan pengembangan pariwisata DIY sejak tahun 1990-an mampu meningkatkan pendapatan daerah, swasta dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wisata.

Dalam menghadapi tantangan maupun mengantisipasi dampak negatif dari interaksi

langsung antara wisatawan dengan masyarakat setempat diperlukan kebijakan pengembangan yang tepat dan efektif. Oleh sebab itu dalam pengembangan pariwisata DIY diperlukan suatu pengambilan kebijakan sistem *top down* dan *bottom up* sehingga seluruh aspirasi dan kepentingan semua unsur terkait dipertimbangkan, dikaji dan dianalisis secara praktis maupun ilmiah.

Dimensi lain yang perlu diantisipasi oleh masyarakat (penentu kebijakan pariwisata), swasta dan masyarakat dalam pembangunan pariwisata adalah interrelasi dan interaksi langsung antara wisatawan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata. Fenomena baru ini merupakan akibat (*derivat*) dari swasta minat khusus yang mendorong perubahan pola perilaku, minat, motivasi dan tujuan para wisatawan untuk mengunjungi suatu objek wisata. Interrelasi dan interaksi langsung ini dapat mempengaruhi perilaku dan polapikir masyarakat. Masalah ini perlu diantisipasi sedini mungkin guna mencegah terjadinya perubahan nilai sosial budaya secara "fundamental" yang tidak sesuai dengan nilai luhur, moralitas dan mentalitas masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan strategi dan implikasi kebijakan pengembangan pariwisata yang mencerminkan upaya "merekayasa" perubahan sosial budaya ke arah terpeliharanya identitas dan integritas, sekaligus mencegah periode anomie dimana situasi sosial – psikologi masyarakat diwarnai oleh kebingungan (Soemardjan; 1991, 169 – 189).

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sering terjadi "ketidakpastian" dalam arti; kita sulit menjamin kepastian apa yang terjadi di

masa depan. Oleh sebab itu Dye menegaskan setiap kebijakan yang diambil, baik kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dipandang sebagai pilihan rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing (Syamsi ; 1986), sehingga setiap kebijakan merupakan *out put* dari setiap *input* setelah melalui proses analisis lingkungan strategis maupun pendekatan holistik (sistemik)

Teori permainan (*game theory*) yang dikemukakan oleh Dye di atas, semakin membuktikan bahwa dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata DIY perlu melibatkan semua unsur terkait. Proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan seperti ini mencerminkan penggunaan analisis lingkungan strategis, pendekatan sistemik dan pendekatan ketahanan nasional guna merekayasa perubahan nilai sosial budaya sesuai kepentingan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sekaligus untuk mengantisipasi sedini mungkin setiap tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG) yang mengancam stabilitas pembangunan dan ketahanan daerah di bidang sosial budaya.

Dalam konteks yang lebih spesifik, untuk mengantisipasi kemungkinan tantangan dan ancaman pembangunan pariwisata terhadap identitas dan integritas kehidupan sosial budaya DIY masa kini maupun masa depan, perlu dirumuskan strategi pengembangan dan pendayagunaan potensi pariwisata secara transparan, proporsional dan berorientasi pada upaya memperkokoh perasaan bangga dan cinta pada atraksi dan seni budaya daerah dikalangan generasi muda.

Secara realitas pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata DIY menghadapi berbagai hambatan, sehingga belum mampu

menghasilkan kinerja secara optimal. Hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor :

- a. Koordinasi dan kerjasama lintas sektoral belum terlaksana dengan baik.
- b. Masih adanya perbedaan persepsi mengenai pengelolaan pariwisata.
- c. Struktur dan infrastruktur pariwisata belum memadai, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang profesional, serta lemahnya manajemen pariwisata.
- d. Masih terbatasnya penanaman modal (investasi) dan dukungan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- e. Promosi objek wisata di luar negeri belum optimal, sehingga objek wisata DIY kurang dikenal oleh wisatawan mancanegara.
- f. Tingkat pelayanan, kenyamanan, dan keamanan para wisatawan di lokasi objek wisata belum memadai.

Dengan memperhatikan sisi politik dan ketahanan nasional dari pengolahan dan pengembangan potensi pariwisata DIY, berarti dalam perumusan strategi dan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata selalu mempertimbangkan dan memperhitungkan segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang membahayakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta upaya peningkatan keuletan dan ketangguhan pribadi warga masyarakat dalam menghadapi dampak negatif pembangunan pariwisata.

Bertolak pada proporsi diatas, semakin menunjukkan bahwa faktor "paling mendasar" yang perlu diperhatikan semua unsur terkait dengan pariwisata di DIY guna mendorong efektivitas pengembangan dan pendayagunaan potensi pariwisata dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya :

- a. Mempersiapkan Peraturan Daerah yang dijadikan sumber hukum yang jelas dan pendayagunaan potensi pariwisata.
- b. Mempersiapkan seluruh struktur dan infrastruktur pariwisata secara memadai.
- c. Membina koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, termasuk menggalang dukungan proaktif dari seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata.
- d. Meningkatkan kesadaran hidup bermasyarakat, memupuk rasa bangga dan cinta seni budaya daerah, pembinaan moralitas dan mentalitas, serta ketrampilan dan kesempatan berusaha masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata.
- e. Meningkatkan keuletan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman yang merongrong stabilitas pembangunan daerah serta identitas dan integritas kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya.
- f. Meningkatkan sadar wisata dan pembudayaan sapa pesona pariwisata kepada seluruh masyarakat guna mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata.

Pengembangan dan pendayagunaan potensi pariwisata di DIY dapat diperoleh gambaran bahwa pada dasarnya pembangunan pariwisata membawa "tiga misi", yakni daerah, nasional, dan internasional, dimana lingkup daerah, harus mampu menimbulkan rasa cinta tanah air untuk memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa, sedangkan lingkup internasional ditekankan pada upaya memperkenalkan kekayaan alam dan nilai budaya Indonesia kepada bangsa-bangsa di dunia.

Melihat ketiga misi pembangunan pariwisata di atas, jelaslah bahwa baik secara conceptual maupun faktual pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata DIY berorientasi pada; upaya peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan material kepada semua unsur terkait dengan pariwisata, serta upaya menumbuhkan rasa bangga dan cinta pada seni budaya daerah, serta terpeliharanya identitas dan integritas kehidupan sosial budaya, dan secara totalitas orientasi pengembangan pariwisata ini dapat mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang indikatornya meliputi :

- a. Semakin mantapnya pembangunan dan pengembangan pariwisata DIY.
- b. Meningkatnya pendapatan daerah, swasta, dan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar lokasi wisata guna menekan kecemburuan sosial.
- c. Semakin kokohnya persatuan, kesatuan, toleransi dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Proses akulturasi, asimilasi maupun perubahan nilai sosial budaya yang terkendali, dalam arti tidak menimbulkan kemerosotan nilai-nilai luhur, moralitas dan mentalitas pribadi dan masyarakat yang berdasarkan Agama, Pancasila, dan UUD 1945.
- e. Terpeliharanya nilai-nilai, benda-benda, fasilitas kebudayaan dan museum yang bernilai historis, yang merupakan personifikasi dan ciri khas kebudayaan daerah.
- f. Meningkatnya pakar seni dan budaya daerah serta generasi muda yang mempelajari dan melestarikan nilai seni dan budaya daerah.

- g. Meningkatnya penyuluhan, pembinaan, dan pendidikan ketrampilan, kegiatan usaha dan lapangan kerja masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wisata.

D. KESIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengembangan dan pendayagunaan potensi pariwisata di Propinsi DIY dapat meningkatkan pendapatan daerah, swasta dan masyarakat. Kondisi ini mendorong peningkatan peran serta aktif (proaktif) semua unsur terkait dalam mendukung terciptanya suasana kondusif bagi terwujudnya ketahanan sosial budaya.
- b. Proyek masa depan pengembangan pariwisata DIY diarahkan pada pengembangan wisata budaya dengan diversifikasi wisata alternatif yang direkayasa sesuai motivasi dan minat wisatawan minat khusus.
- c. Secara realitas, pelaksanaan strategi dan implikasi kebijakan pengembangan dan pendayagunaan potensi pariwisata DIY mampu meningkatkan keuletan dan ketangguhan warga masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata sehingga tidak terpengaruh pada budaya, polapikir dan perilaku wisatawan mancanegara yang bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1987, *Rencana Induk Pengembangan Pariwisata DIY*, Dinas Pariwisata DIY, Yogyakarta.

Salam, Usmar, 1997, "Pekerjaan Rumah Bagi Pengelola Pariwisata di DIY", *Suara Pembaharuan*, th XI No. 3584, Minggu 20 April 1997, hal. 13.

Soemardjono, Selo dkk, 1992, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP 7 Pusat, Jakarta.

Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Cet. I, Yogyakarta.

Suryohadiprojo, Sayidiman, 1987, *Ketahanan Nasional Indonesia, Jurnal Ketahanan Nasional*, diterbitkan atas kerjasama PPS UGM dengan Lemhanas, Edisi II (1) April 1997, Yogyakarta.

Syamsi, Ibnu, 1986, *Pokok-pokok Kebijakan Perencanaan Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, PT. Rajawali, Indonesia.

Wahab, Salah, 1996, *Manajemen Kepariwisata*, Pradya Paramita, Cetakan III, Jakarta.

BIODATA PENULIS

Lahir di Solo, 17 Juni 1960, lulus Sarjana Fakultas Filsafat UGM pada tahun 1986, Magister Ketahanan Nasional UGM pada tahun 2000, dan saat ini mengajar di STP AMPTA sebagai dosen tetap Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila.

